

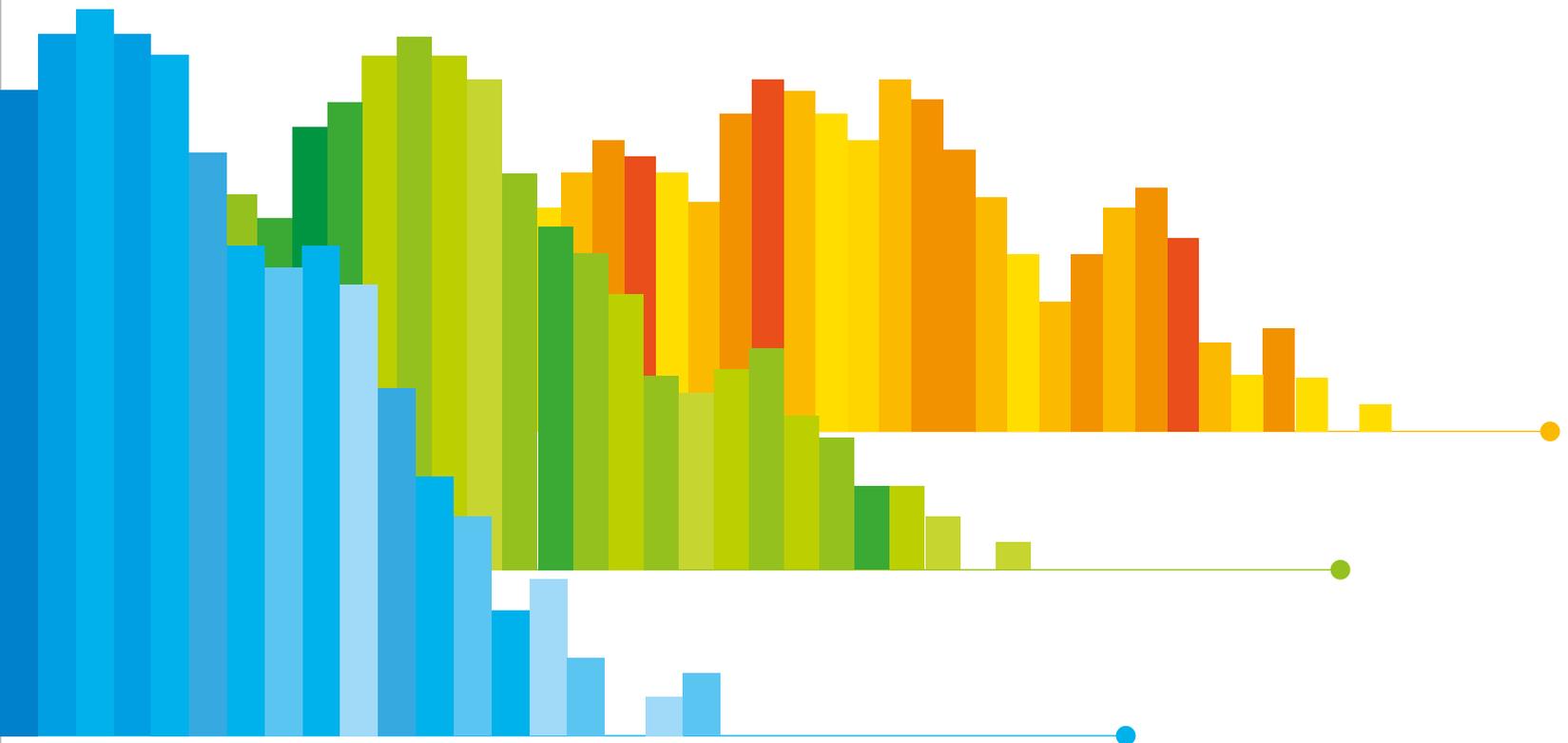


KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

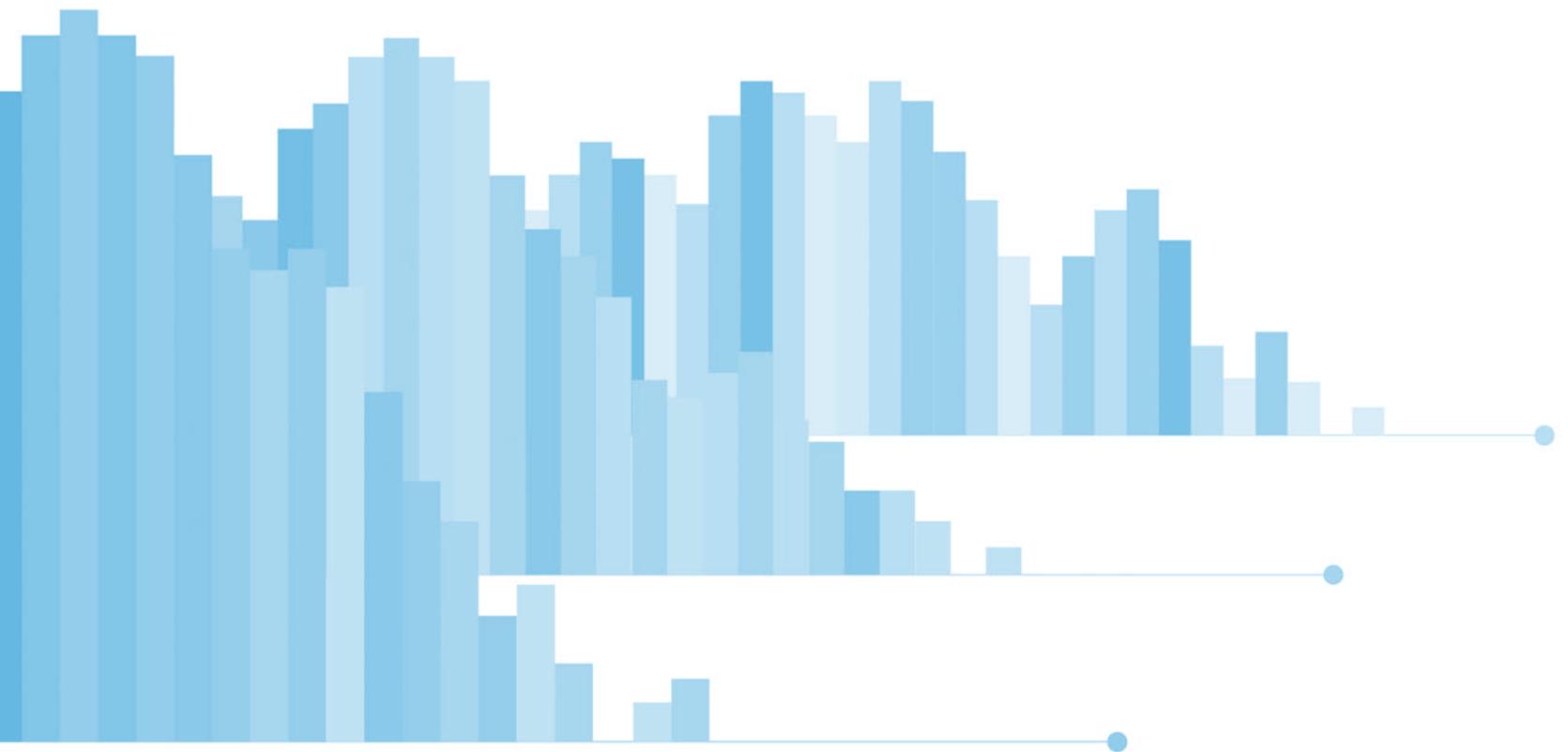


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Pekerjaan Umum yang Responsif Gender



Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Pekerjaan Umum yang Responsif Gender





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah selesai memfasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyusun Data Terpilah di Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyusun Data Terpilah di Kementerian Pekerjaan Umum.

Buku ini merupakan potret situasi dan kondisi laki-laki dan perempuan di Bidang Pekerjaan Umum, meliputi penyajian data dasar, data ketenagakerjaan, data keterlibatan SDM dalam tahapan manajemen serta data pemanfaat hasil di Bidang Pekerjaan Umum.

Data terpilah yang terkumpul merupakan hasil uji coba Panduan Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Pekerjaan Umum yang Responsif Gender, yang telah disusun sebelumnya. Suksesnya penyusunan data terpilah ini berkat kerja sama yang intensif antara konsultan, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c/q Asdep Gender dalam Infrastruktur, melalui serangkaian *workshop* penyusunan dan pengolahan data.

Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kami menyampaikan kepada Ibu Dr. Sudarti Surbakti selaku pakar Data dan Statistik, Bp. Ir. Aziz Hoesein, M. Eng. Dipl. HE, dan Ibu Sri Apriartini Soekardi, MM, Staf Ahli Meneteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, beserta seluruh jajarannya yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga panduan ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender Bidang Pekerjaan Umum.

Jakarta, November 2011

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
Bidang Ekonomi

Hertomo Heroe



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bagi semua Kementerian, dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan pengarusutamaan gender sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan aspek gender.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman yang responsif gender, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU yang Responsif Gender agar setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyiapkan dan menyusun sendiri. Selanjutnya, data terpilah dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam menganalisis kegiatan-kegiatan yang responsif gender di lingkungan kerja masing-masing. Data Terpilah merupakan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi gender, sehingga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengarusutamaan gender.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Namun, mengingat Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Pekerjaan Umum ini merupakan hal yang baru, maka masukan dan saran konstruktif masih kami harapkan untuk penyempurnaannya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman di masa mendatang yang lebih responsif gender.

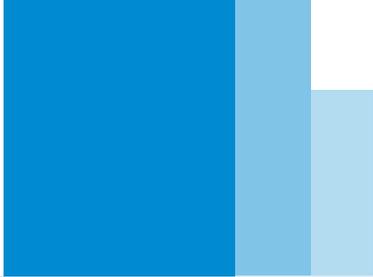
Jakarta, November 2011

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL



Ir. Agoes Widjanarko, MIP



TIM PENYUSUN

PEMBINA :

Kementerian Pekerjaan Umum : Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Linda Amalia Sari, SIP

PENGARAH :

Kementerian Pekerjaan Umum : Ir. Sri Apriatini Soekardi, MM

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : Dr. Ir. Hertomo Heroe, MM

KONTRIBUTOR :

Konsultan : Dr. Soedarti Surbakti

Kementerian Pekerjaan Umum :

1. Ir. Taufik Widjoyono M.Sc.
2. Ir. Panani Kesai M.Sc
3. Ir. Budiprasetyo D. MUP
4. Ir. Lilla Noerhayati S
5. Ir. Ineke Indrarini, M.Eng.Sc, MM
6. Dra. Adi Sasutji, M.Eng.Sc
7. Bangkit A. Wiryawan, S.Sos
8. F. Dini Ambarsari, S.Ip, M.Si
9. Ir. Nurmala Simanjuntak, M.Eng.Sc
10. Dissa Trinovi, ST
11. Ir. Desra, MT
12. Dian Rosnawati, ST, MT

**Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**

- : 1. Dra. Sunarti, MSi
2. Ir. Endah Prihatiningtyastuti, MSi
3. Zamzam Muchtarom, SH, MM
4. Dwi Supriyanto, SH
5. Sri Lestari, S.Sos
6. Nani Dwi Wahyuni
7. Bayu Harie Nugroho

PENYUNTING :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

: Dra. Sunarti, M.Si

DESAIN :

Kementerian Pekerjaan Umum

DITERBITKAN OLEH :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kementerian Pekerjaan Umum

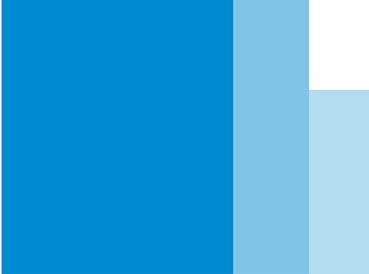
ISBN :

....

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	v
Daftar isi	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Penyusunan Buku Tata Cara	2
1.4 Manfaat Data Terpilah	3
1.5 Jenis Data Terpilah	3
II. METODE PENDEKATAN DALAM PENGUMPULAN DATA TERPILAH	5
2.1 Tahap Pertama: Identifikasi Isu Gender Bidang PU	6
2.2 Tahap Kedua: Penetapan Indikator Pembangunan Bidang PU yang Responsif Gender	6
2.3 Tahap Ketiga: Identifikasi Data Terpilah Pelaku Pembangunan	7
2.4 Tahap Keempat : Identifikasi Data Terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan	7

III. SUMBER DATA	9
3.1 Pengelompokan Cara-cara Pengumpulan Data Terpilah	9
3.2 Pengelompokan dan Sumber Data Terpilah	10
IV. KLASIFIKASI DATA TERPILAH	15
4.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan	15
4.1.1 Data Terpilah SDM Kementerian PU	15
4.1.2 Data Terpilah SDM Ketenagakerjaan Nasional Sektor Bangunan atau Konstruksi	15
4.2 Data Terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan	17
V. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYAJIAN DATA TERPILAH	23
5.1 Tata Cara Perhitungan Data Terpilah yang disajikan dalam Tabel	23
5.2 Penyajian Gambar	25
5.3 Penyajian Narasi	25
5.4 Contoh Perhitungan dan Penyajian Data Terpilah dalam bentuk Tabel, Gambar, dan Narasi	25
VI. PENUTUP	31
Lampiran	33
Daftar Singkatan	55
Daftar Pustaka	57
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	x



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Contoh Kegiatan yang berpotensi memiliki Kesenjangan Gender dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman	19
Tabel 4.2 : Contoh Matriks Identifikasi Kegiatan Kementerian PU yang responsif Gender menurut Komponen Turbinbanglakwas	20
Tabel 4.3 : Format Tabel C.1 Keterlibatan SDM Pelaku Pembangunan menurut Komponen/Sub Komponen dan Jenis Kelamin, Tahun	21
Tabel 4.4 : Format Tabel C.2 Data Kuantitatif atau Kualitatif Penerima Manfaat Hasil Pembangunan, Tahun	22
Tabel 5.1 : Format Tabel Penjumlahan Laki-laki dan Perempuan menurut Kategori	24
Tabel 5.2 : Format Tabel Perhitungan Persentase secara Horizontal Laki-laki dan Perempuan dalam Satu Kategori dan antar Jenis Kelamin	24
Tabel 5.3 : Format Tabel Perhitungan Persentase secara Vertikal Laki-laki dan Perempuan antar Kategori dalam Satu Jenis Kelamin	24
Tabel 5.4 : Format Tabel Perhitungan Persentase secara Diagonal Laki-laki dan Perempuan antar Kategori dan antar Jenis Kelamin	24
Tabel 5.5 : Contoh Tabel A.1 Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PU menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/staf) dan Jenis Kelamin, Tahun 2011	26
Tabel 5.6 : Contoh Pertama Tabel C.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan Tahun 2008 – 2010	27

Tabel 5.7 : Contoh Pertama Tabel C.2 Data Terpilah Kuantitatif Penerima Manfaat Tahun 2010	28
Tabel 5.8 : Contoh Kedua Tabel C.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan Tahun 2008 – 2010	29
Tabel 5.9 : Contoh Kedua Tabel C.2 Data Terpilah Penerima Manfaat Hasil Pembangunan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Tahapan Kegiatan Pengumpulan Data Terpilah Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PU	5
Gambar 5.1 Contoh Penyajian Gambar untuk Contoh Tabel A.1	26
Gambar 5.2 Contoh Penyajian Narasi untuk Contoh Tabel A.1	26

DAFTAR LAMPIRAN

1. <i>Rapid Assessment Procedures/Focuses Group Discussion</i>	35
2. Format tabel A1 – A12 untuk data terpilah SDM Kementerian/Lembaga	41
3. Format tabel B1 – B9 untuk data terpilah SDM Ketenagakerjaan bidang konstruksi/bangunan	49
4. Daftar Singkatan	55
5. Daftar Pustaka	57

1.1 Latar Belakang

Telah diratifikasinya beberapa landasan hukum internasional mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh negara-negara anggota PBB merupakan wujud komitmen dalam upaya pelaksanaan PUG, termasuk di Indonesia. Landasan-landasan hukum internasional tersebut antara lain: *Convention on the Political Rights of Women (1952)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979)*, *International Conference on Population and Development (ICPD, 1994)*, *Beijing Declaration and Platform For Action (BPFA, 1995)*, dan *Millenium Development Goals (MDGs, 2001)*.

Di tingkat nasional, Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dengan menerapkan pengarusutamaan gender melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman pada umumnya cenderung memiliki karakteristik netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan, namun demikian perlu penelaahan lebih lanjut secara menyeluruh di dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman, untuk mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang netral gender atau memiliki kesenjangan gender melalui analisis gender berdasarkan data terpilah sebagai data pembuka wawasan.

Mengingat pentingnya data terpilah sebagai pembuka wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU, yang dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja di Kementerian PU dalam menyusun Program dan Kegiatan Bidang PU yang responsif gender.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan buku tata cara penyusunan data terpilah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
4. Rencana Strategis Kementerian PU tahun 2010-2014, dalam Arah Kebijakan dan Strategi, yang menyebutkan bahwa pengarusutamaan gender akan diterapkan dalam setiap penyusunan, perencanaan, penganggaran, serta implementasinya, melalui program dan kegiatan.
5. Surat Keputusan Menteri PU No. 134/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender, junto surat keputusan nomor 363/KPTS/M/2009 dan nomor 25/KPTS/SJ/2007. Surat Keputusan Menteri PU ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian PU pada tanggal 18 Desember 2008 untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan PUG Bidang PU.

1.3 Tujuan Penyusunan Buku Tata Cara

Buku Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU yang Responsif Gender ini merupakan pelengkap dari buku Panduan Umum Penyusunan Data Terpilah yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan PA. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam mengidentifikasi data terpilah gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

1.4 Manfaat Data Terpilah

Beberapa manfaat dari data terpisah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara.
2. Digunakan dalam melakukan analisis gender melalui *Gender Analisis Pathway* (GAP) atau *gender check list* yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang berbasis kinerja.
3. Sebagai dasar untuk mengintervensi/mereformulasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

1.5 Jenis Data Terpilah

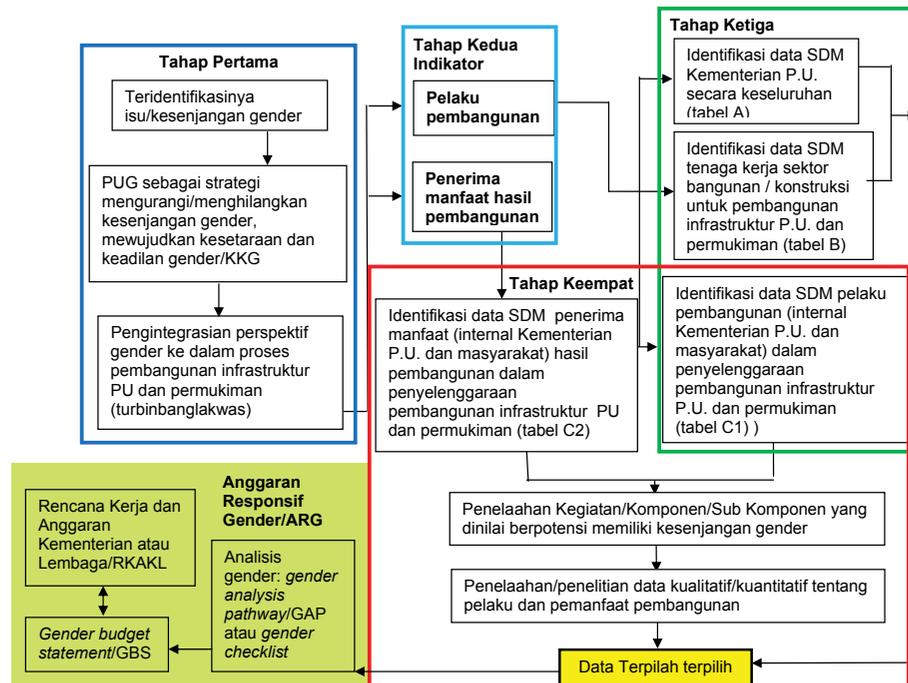
Jenis data terpisah yang akan disajikan terdiri dari :

1. Data terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU dan data ketenagakerjaan terkait bidang PU sebagai pelaku pembangunan
2. Data terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur PU dan Permukiman yaitu dari komponen Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan/Pelaksanaan dan Pengawasan (turBinBang/ LakWas) sebagai data pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan
3. Data lain-lain, yang disusun terkait dengan sarana dan prasarana bangunan/gedung , antara lain seperti toilet, ruang ASI, Taman Penitipan Anak (TPA)

BAB II

METODE PENDEKATAN DALAM PENGUMPULAN DATA TERPILAH

Ketersediaan data terpisah merupakan prasyarat untuk analisis gender (*gender analysis pathway/ GAP* atau *gender checklist*) yang diperlukan bagi penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan reformulasi kebijakan yang responsif gender. Kedudukan data terpisah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PU, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta langkah-langkah pengumpulan data tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Alur Pikir Tahapan Kegiatan Pengumpulan Data Terpisah Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PU

Gambar 2.1 tersebut di atas menunjukkan alur pikir dalam pengumpulan data terpilah. Alur pikir tersebut dibagi menjadi 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

2.1. Tahap Pertama: Identifikasi Isu Gender Bidang PU

Di dalam pengumpulan data terpilah, isu gender merupakan prasyarat utama yang harus diidentifikasi dalam rangka upaya penelaahan kegiatan yang responsif gender. Isu gender di Indonesia telah memicu Pemerintah untuk segera menghilangkan atau mengurangi adanya kesenjangan gender. Untuk itu, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan, atau perspektif gender ke dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman.

Proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU meliputi komponen Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan/Pelaksanaan, dan Pengawasan (Turbinbanglakwas). Isu-isu gender bidang PU diidentifikasi dari komponen Turbinbanglakwas, dengan mempertimbangkan aspek-aspek pencapaian prioritas MDG's, RPJMN, dan Renstra Kementerian PU.

2.2. Tahap Kedua: Penetapan Indikator Pembangunan Bidang PU yang Responsif Gender

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang PU yang responsif gender dapat diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan. Kegiatan yang responsif gender dapat diukur melalui kesetaraan dan keadilan dari Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan, yaitu kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum *diffable*), mempunyai kesetaraan dan keadilan di dalam kesempatan untuk mendapatkan akses, berpartisipasi/terlibat, memiliki kontrol/pengawasan dalam pembangunan dan menerima manfaat hasil pembangunan.

2.3. Tahap Ketiga: Identifikasi Data Terpilah Pelaku Pembangunan

Pada tahap ketiga dilakukan identifikasi data terpilah sebagai pelaku pembangunan, yang terdiri dari data:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian P.U. secara keseluruhan
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan Sektor Bangunan/Konstruksi untuk Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman.
3. Sumber Daya Manusia / SDM (termasuk SDM pada butir 1 dan 2 tersebut diatas serta lainnya) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman meliputi aspek : Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan/Pelaksanaan dan Pengawasan (Turbinbang/lakwas)

2.4. Tahap Keempat : Identifikasi Data Terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan

Pada tahap keempat dilakukan pemilihan data terpilah pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan melalui penelaahan kegiatan yang responsif gender dalam aspek penyelenggaraan pembangunan infrastaruktur PU dan Permukiman (Turbinbanglakwas), dengan cara sebagai berikut:

1. Penelaahan Kegiatan/Komponen/Sub Komponen yang dinilai berpotensi memiliki kesenjangan gender., bisa digunakan kriteria a.l. sbb :
 - a. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Terkait dengan kegiatan pembinaan SDM (capacity building, sosialisasi, pelatihan dll);
 - c. Terkait dengan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang PU
 - d. Terkait dengan Penyusunan NSPK / Produk pengaturan tentang gender
2. Penelaahan Kegiatan/Komponen/Sub Komponen terpilih yang berpotensi memiliki kesenjangan gender, berdasarkan jenis kegiatan, pelaku kegiatan, serta penerima manfaat hasil kegiatan.
3. Penelaahan data terpilah terpilih kualitatif atau kuantitatif yang bersumber dari data primer atau sekunder, pada kegiatan/komponen/sub komponen terpilih yang berpotensi memiliki kesenjangan gender.

Pada gambar 2.1 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa data terpilah terpilih dihasilkan dari identifikasi data sumber daya manusia/SDM baik sebagai pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan.

Adapun data **SDM sebagai pelaku pembangunan** terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU secara keseluruhan yang disajikan pada tabel A - Buku II (Terpisah dari Buku I / Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU yang Responsif Gender ini)
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan Sektor Konstruksi Bidang PU yang disajikan pada tabel B - Buku II (Terpisah dari Buku I / Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU yang Responsif Gender ini)
3. Sumber Daya Manusia (SDM) (termasuk SDM pada butir 1 dan 2 tersebut diatas serta lainnya) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman: Turbinbanglakwas yang disajikan pada tabel C1.

Sedangkan data **SDM sebagai penerima manfaat hasil pembangunan** adalah data SDM dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur P.U. dan Permukiman yang disajikan pada tabel C2.

Data terpilah terpilih digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam analisis gender dengan metode *gender analysis pathway/GAP* maupun metode analisis gender lainnya. Hasil analisis gender digunakan sebagai input dalam menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG), pada kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), yang kemudian dituangkan dalam bentuk *Gender Budget Statement (GBS)*.

3.1 Pengelompokan Cara-cara Pengumpulan Data Terpilah

Terdapat 2 (dua) cara untuk pengumpulan data terpilah, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder secara kualitatif dan kuantitatif, sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara survei atau observasi langsung di lapangan/lokasi/sumber di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum atau instansi terkait. Penelitian/penelaahan data primer kualitatif/kuantitatif perlu dilakukan apabila data sekunder tidak tersedia.

Penelitian/penelaahan data primer dapat dilakukan dengan cara survei data kuantitatif dan survei data kualitatif. Survei data kualitatif secara sederhana dapat dilakukan melalui metode *rapid assessment* atau *focused group discussion/FGD*, yang secara detil dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara studi literatur atau menelaah dan mengolah kompilasi data yang sudah ada pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum atau institusi yang terkait, contoh data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Pengelompokan dan Sumber Data Terpilah

Pengelompokan terpilah terbagi menjadi 2 (dua) bagian data, dengan sumber perolehan data sebagai berikut :

Kelompok 1 : Data terpilah SDM Pelaku pembangunan, yang terdiri dari:

a. Data terpilah SDM Kementerian Pekerjaan Umum

Data terpilah SDM ini dirinci menurut jenis kelamin dan berbagai kategori seperti golongan kepangkatan, eseloneering, dan jabatan (struktural, fungsional, dan staf) dan lainnya. Sumber data terpilah SDM dalam lingkup Kementerian PU diperoleh dari Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal. Sedangkan Data terpilah SDM dalam lingkup Unit Kerja Eselon-1 dan Eselon-2 diperoleh dari Unit-Unit Kepegawaian yang terdapat pada Satuan Administrasi Pangkal/Satminkal dan Balai-Balai yang ada di Kementerian PU.

Tata cara ini diperuntukan bagi seluruh Satminkal dan Balai-Balai di lingkungan Kementerian PU, namun dalam hal ini yang menjadi lokus penelaahan untuk mewakili data terpilah SDM PU adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Jenderal (Setjen)
- 2) Inspektorat Jenderal (Itjen)
- 3) Direktorat Jenderal Penataan Ruang (Ditjen Taru)
- 4) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA)
- 5) Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen B.M.)
- 6) Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen C.K.)
- 7) Badan Pembinaan Konstruksi (Bapekon)
- 8) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Sedangkan yang mewakili lokus penelaahan Balai-Balai adalah :

Balai-Balai di Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- 1) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane
- 2) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Jakarta
- 3) Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi
- 4) Balai Pendidikan dan Pelatihan PU Wilayah VI Jakarta
- 5) Balai Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sosekling) Bidang SDA DKI Jakarta

Balai-Balai di Provinsi Jawa Timur meliputi:

- 1) Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
- 2) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Surabaya
- 3) Balai Pendidikan dan Pelatihan PU Wilayah IV Surabaya
- 4) Balai Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan/Sosekling Bidang Jalan dan Jembatan Surabaya

b. Data SDM Ketenagakerjaan Nasional yang terkait dengan Sektor Pekerjaan Umum

Salah satu jenis klasifikasi ketenagakerjaan (oleh BPS) adalah menurut lapangan usaha/pekerjaan atau yang diistilahkan sebagai 'sektor'. Sektor tenaga kerja yang terkait Bidang PU adalah Sektor Bangunan atau Konstruksi.

Berdasarkan definisi *International Standard Industrial Classification/ISIC* (Dr. Mudjihandoko, 2011), yang dimaksud dengan Sektor Bangunan atau Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan tersebut berupa, antara lain, gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandar udara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain.

Sumber data ketenagakerjaan sektor ini berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Kemenakertrans. Data dari Kemenakertrans bersifat khusus sehingga tidak disajikan dalam buku ini (karena tidak dapat digunakan oleh Kementerian PU).

Data ketenagakerjaan Sektor Bangunan atau Konstruksi yang berasal dari BPS dikumpulkan melalui pendataan yang berbasis masyarakat dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan rumah tangga (menggunakan survei angkatan kerja nasional/Sakernas dan survei sosial ekonomi nasional/Susenas) dan pendekatan perusahaan (dengan kunjungan ke beberapa perusahaan konstruksi skala besar, sedang, dan kecil, termasuk usaha rumah tangga).

Data ketenagakerjaan Sektor Bangunan atau Konstruksi yang diperoleh dari BPS saat ini tidak dapat digunakan secara optimal oleh Kementerian PU mengingat cakupan data tersebut juga terkait dengan tenaga kerja sektor di luar Kementerian PU, contohnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Untuk menyikapi hal tersebut, Kementerian PU, dalam hal ini Bapekon, bekerjasama dengan BPS akan mengadakan survei ketenagakerjaan khusus untuk Sektor Bangunan atau Konstruksi Kementerian PU.

Kelompok 2 : Data terpilah SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PU, yang terdiri dari SDM pelaku pembangunan dan SDM penerima manfaat hasil pembangunan, baik yang ada dilingkungan Kementerian PU maupun lainnya. Sumber data terpilah tersebut diidentifikasi dari kegiatan penyelenggaraan pembangunan bidang PU yang responsif gender pada Satminkal dan Balai-Balai.

Aspek serta komponen yang tercakup dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PU adalah sebagai berikut :

1) Pengaturan (Tur)

- Penyusunan Naskah Akademis
- Peraturan Perundang-undangan
- Kajian Kebijakan
- Penyusunan NSPK
- Penyusunan Renstra/LAKIP/Rencana Investasi/KPJM
- Penyusunan *Master Plan*/RTR
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Pengaturan Lainnya

2) Pembinaan/Pemberdayaan

- Pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan, dll.
- Operasional Perkantoran
- Administrasi Kegiatan
- Pembinaan/Pemberdayaan SDM
- Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar
- Pendidikan dan Latihan
- Bimbingan/Pendampingan
- Fasilitasi
- Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen
- Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama
- Manajemen SDM Bidang PU
- Manajemen Aset Bidang PU
- Manajemen Keuangan Bidang PU

- Pemetaan Mitra Bidang PU
- Pemetaan Infrastruktur, Sosial, Ekonomi, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan
- Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual
- Bantuan Hukum/Legal
- Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building)
- Promosi/Peluang Investasi/Kinerja
- Pemeliharaan Pra Sarana dan Sarana Internal Kemen. PU
- Peningkatan/Pembangunan Pra Sarana dan Sarana Internal Kementerian PU
- Bantuan Peralatan/Material/Kepustakaan
- Dukungan Kepustakaan
- Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kelayakan
- Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya
- Penyusunan Data dan Profile
- BLM Fisik
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

3) Pembangunan/Pelaksanaan

- Pra Studi Kelayakan
- Studi Kelayakan
- Studi Lainnya
- Survei dan Investigasi
- Perencanaan Teknik (DED)
- Analisis mengenai Dampak Lingkungan
- Pengawasan Teknik dan Supervisi
- Penelitian dan Pengembangan
- Pembangunan Lainnya
- OP/Rutin
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala
- Peningkatan

- Pembangunan
- Pembebasan Tanah
- Fisik Penunjang
- Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana

4) Pengawasan

- Monitoring dan Evaluasi
- Manajemen Pengendalian
- Manajemen Pengendalian Kepatuhan
- Pelaksanaan Pemeriksaan
- Tindak Lanjut Pemeriksaan
- Kajian Makro Pengawasan
- Pengawasan Lainnya

Sumber data terpilah yang telah terkumpul berasal dari Satminkal dan Balai yang menjadi lokus penelaahan adalah sebagai berikut :

- a. Ditjen. Cipta Karya
- b. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
- c. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya
- d. Balai Litbang Sosekling Bidang Jalan dan Jembatan Surabaya
- e. Balai Diklat PU Wilayah IV Surabaya
- f. Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Surabaya

Selain dua bagian kelompok tersebut diatas, masih ada data lainnya yaitu data lain-lain meliputi hasil penelitian yang terkait dengan isu gender untuk sarana dan prasarana gedung Kementerian Pekerjaan Umum, seperti tersedianya fasilitas untuk kaum *diffable*, Ruang ASI, Taman Penitipan Anak (TPA), serta toilet laki-laki dan perempuan, yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengolahan data primer dan sekunder.

KLASIFIKASI DATA TERPILAH

Data terpilah Bidang PU dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : 1) Data Terpilah Pelaku Pembangunan SDM Kementerian PU secara keseluruhan, dan Pelaku Pembangunan terkait SDM Ketenagakerjaan Sektor Bangunan / Konstruksi Bidang PU; serta 2) Data Terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan terkait SDM (SDM PU, Tenaga Kerja Konstruksi dan lainnya) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan/pelaksanaan, dan pengawasan (Turbinbanglakwas).

Data terpilah diklasifikasikan berdasarkan pembagian kelompok data sebagai berikut :

4.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan

Data terpilah pelaku pembangunan yang dimaksud dalam sub bab ini adalah data terpilah SDM Kementerian PU dan SDM Ketenagakerjaan pembangunan nasional Sektor Bangunan atau Konstruksi.

4.1.1 Data Terpilah SDM Kementerian PU

Penyusunan data terpilah SDM Kementerian PU dilakukan untuk menggambarkan kondisi keseluruhan SDM Kementerian PU dan masing-masing Satminkal yang meliputi: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Penataan Ruang, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Badan Pembinaan Konstruksi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Data terpilah SDM Kementerian PU dikelompokkan menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu A.1 sampai dengan A.12, sebagai berikut :

- A.1. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/staf) dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.2. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun ...,

- A.3. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Golongan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.4. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.5. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Provinsi Wilayah Tempat Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.6. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) Perekrutan Tiga Tahun Terakhir menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.7. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Keikutsertaan dalam Tugas Belajar S2/S3 Di Luar/Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.8. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Keikutsertaan dalam Diklat Teknis/Administrasi/Penjengangan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.9. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.10. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.11. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- A.12. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jenis Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin, Tahun

Sedangkan Format Tabel A.1 – A.12 (yang belum terisi data terpilah) disajikan pada Lampiran 2.

4.1.2 Data Terpilah SDM Ketenagakerjaan Nasional Sektor Bangunan atau Konstruksi

Data terpilah SDM Ketenagakerjaan Sektor Bangunan atau Konstruksi perlu disajikan untuk menggambarkan kondisi pelaku pembangunan dalam Bidang Konstruksi PU dan Permukiman. Data terpilah SDM Ketenagakerjaan Sektor Bangunan atau Konstruksi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok, yaitu B.1 sampai dengan B.9, sebagai berikut :

- B.1. Jumlah dan Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.2. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.3. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.4. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.5. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun ...
- B.6. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Rata-rata Jam Kerja per Minggu dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.7. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Skala Perusahaan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.8. Jumlah dan Persentase Pekerja Perusahaan Konstruksi Besar/Sedang menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun ...,
- B.9. Jumlah dan Persentase Pekerja Usaha Konstruksi kecil dan Rumah Tangga, Status (pengusaha/buruh) dan Jenis Kelamin, Tahun

Sedangkan Format Tabel B.1 – B.9 (yang belum terisi data terpilah) disajikan pada Lampiran 3.

4.2 Data Terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan

Data terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan terdiri data SDM Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat hasil pembangunan. Data terpilah ini perlu disajikan untuk menggambarkan kondisi besarnya peran pelaku pembangunan dan besarnya manfaat hasil pembangunan. Data terpilah ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

Kelompok 1 : Data Terpilah Pelaku Pembangunan (Tabel C.1.) , dan

Kelompok 2 : Data Terpilah Penerima Manfaat Hasil Pembangunan (Tabel C.2.).

Tabel C.1 dan C.2 disusun oleh masing-masing Satminkal dan Balai- Balai.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Sub Bab 2.4, maka tahapan kegiatan pengumpulan data terpilah penyelenggaraan pembangunan Bidang PU, data terpilah pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub-komponen yang berpotensi memiliki kesenjangan gender, dari kegiatan prioritas yang mendukung sebagai berikut :
 - a. Pencapaian MDG's,
 - b. Termasuk dalam Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2010-2014 , Buku II Bab I),
 - c. Bersifat pemberdayaan masyarakat (*Service Delivery*),
 - d. Bersifat pelembagaan PUG (*capacity building*, sosialisasi, pengumpulan data terpilah dll).
2. Integrasikan Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen yang terpilih (telah memenuhi kriteria di atas) ke dalam aspek penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman: Turbinbanglakwas. Contoh pengintegrasian dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2.
3. Isi data terpilah Pelaku Pembangunan dari Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub-komponen yang sudah dilaksanakan dari tahun sebelumnya. Apabila Program/Kegiatan/ Output/ Komponen/Sub-komponen belum dilaksanakan, maka pengisian data terpilah dapat menggunakan data sekunder. Format tabel C.1 dapat dilihat pada Tabel 4.3
4. Isi data terpilah Penerima Manfaat hasil pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman dari Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub-komponen yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Apabila Program/ Kegiatan/Output/ Komponen/Sub-komponen belum dilaksanakan, maka pengisian data terpilah dapat menggunakan data sekunder. Format tabel C.2 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.1
Contoh Kegiatan yang berpotensi memiliki Kesenjangan Gender
dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dan Permukiman

No	Satminkal	Satker	Komponen	Sub Komponen	Aspek Turbin banglak was	Kriteria
1	Sekretariat Jenderal	Pusat Komunikasi Publik	Publikasi melalui Media Massa	Pengenalan Infrastruktur PU melalui Media TV	Bin	Sosialisasi
		Pusat Pengolahan Data	Bantuan Teknis/ Administrasi/ Manajemen	Penyusunan dan Perumusan Buku Induk Statistik Infrastruktur Bidang PU	Tur	Sosialisasi
2	Badan Pembinaan Konstruksi	Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	TOT Pencegahan HIV AIDS bagi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia	Bin	Sosialisasi
				Pelatihan Project Cycle (Perencanaan, Appraisal dan Manajemen Project)	Bin	Pembinaan SDM
3	Badan Penelitian dan Pengembangan	Puslitbang Sosekling	Layanan Bid. Program dan Kerjasama	Koord. dan Sinkronisasi PUG PU	Bin	Pembinaan SDM
		Balai Litbang Sosekling Bid. SDA	Penelitian Sosek dalam rangka Penanggulangan Bencana	-	Tur	NSPK
5	Ditjen Bina Marga	Dit. Bina Teknik	Penyusunan NSPK	Teknik Lingkungan	Tur	NSPK
6	Ditjen Sumber Daya Air	BBWS Cimanuk - Cisanggarung	Operasi dan Pemeliharaan	Swakelola OP Pemantauan Kualitas Air	Bin	
		SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cimanuk - Cisanggarung	Pembangunan	Pembangunan jaringan air baku Desa Sindanggalih Kec. Karang Tengah Kab. Garut	BangLak	Pemberdayaan Masyarakat
7	Ditjen. Cipta Karya	Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat	Persiapan, Sosialisasi, Pelatihan, dan pelaksanaan PPIP/RIS	Bin	Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4.2
Contoh Matriks Identifikasi Kegiatan Kementerian PU yang responsif Gender menurut
Komponen Turbinbanglakwas

Satminkal/ Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen	Pengaturan	Pembinaan/ Pemberdayaan	Pembangunan/ Pelaksanaan	Pengawasan	Pelaku Pembangunan
1. Ditjen Cipta Karya					
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman					
Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman					
Komponen Pemberdayaan Masyarakat					
Sub Komponen Persiapan, Sosialisasi, Pelatihan, dan pelaksanaan PPIP/RIS	Pembuatan pedoman	Sosialisasi	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan	Pengawasan: pra pembangunan, pembangunan, dan pasca pembangunan	Internal Kementerian P.U. dan masyarakat

Tabel 4.3
Format Tabel C.1 Keterlibatan SDM Pelaku Pembangunan menurut Komponen/Sub
Komponen dan Jenis Kelamin, Tahun ...

Satminkal : ...
 Program : ...
 Kegiatan : ...
 Komponen : ...

Komponen/Sub komponen	Pengaturan		Pembinaan/ Pemberdayaan (SDM)		Pembangunan/ Pelaksanaan		Pengawasan	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Komponen/Sub Komponen 1 :								
Jumlah TIM Pelaksana								
Persentase								
Komponen/Sub Komponen 2.....								
Jumlah								
Persentase								
Komponen/Sub komponen 3.....dst.								
Jumlah								
Persentase								
Seluruh komponen terpilih								
Jumlah								
Persentase								

Tabel 4.4
Format Tabel C.2 Data Kuantitatif atau Kualitatif Penerima Manfaat Hasil Pembangunan,
Tahun ...

Komponen/Sub komponen 1:
Data Kuantitatif: Penjelasan:
Narasi Kualitatif: Penjelasan:
Komponen/Sub komponen 2:
Data Kuantitatif: Penjelasan:
Narasi Kualitatif: Penjelasan:
Komponen/Sub komponen 3:dst
Data Kuantitatif: Penjelasan:
Narasi Kualitatif: Penjelasan:

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYAJIAN DATA TERPILAH

Data terpilah dapat disajikan dalam 3 (tiga) bentuk: tabel, gambar, dan narasi, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1 Tata Cara Perhitungan Data Terpilah yang disajikan dalam Tabel

Penyajian tabel data terpilah menurut jenis kelamin dilakukan untuk menganalisis kondisi/pemetaan SDM laki-laki dan perempuan dengan beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan komposisi keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam suatu kategori;
2. Untuk menggambarkan perbandingan nilai indikator keterlibatan dalam suatu kategori secara relatif antara laki-laki dan perempuan
3. Untuk menggambarkan proporsi terhadap seluruh populasi

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, perhitungan SDM Laki-laki dan Perempuan pada tabel dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu:

1. menjumlahkan laki-laki dan perempuan menurut kategori (seperti eselonering, golongan, atau sektor konstruksi) (pada Tabel 5.1)
2. menghitung persentase secara horizontal (pada Tabel 5.2)
3. menghitung persentase secara vertikal (pada Tabel 5.3)
4. menghitung persentase secara diagonal (pada Tabel 5.4)

Gabungan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, gabungan Tabel 5.1 dan Tabel 5.3, atau gabungan Tabel 5.1 dan Tabel 5.4, dapat diimplementasikan untuk penyajian kelompok Tabel A.1 – A.12, dan kelompok Tabel B.1 – B.9.

Tabel 5.1
Format Tabel Penjumlahan Laki-laki dan Perempuan menurut Kategori

KATEGORI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
A	K	l	k+l
B	M	n	m+n
A+B	+m	l+n	k+l+m+n

Catatan : Jenis Kategori disesuaikan dengan Bab IV, Sub Bab 4.1

Tabel 5.2
Format Tabel Perhitungan Persentase secara Horizontal Laki-laki dan Perempuan dalam Satu Kategori dan antar Jenis Kelamin

KATEGORI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
A	$k/(k+l)$	$l/(k+l)$	$k+l = 100\%$
B	$m/(m+n)$	$n/(m+n)$	$m+n = 100\%$
A+B	$(k+m)/(k+l+m+n)$	$(l+n)/(k+l+m+n)$	$k+l+m+n = 100\%$

Tabel 5.3
Format Tabel Perhitungan Persentase secara Vertikal Laki-laki dan Perempuan antar Kategori dalam Satu Jenis Kelamin

KATEGORI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
A	$k/(k+m)$	$l/(l+n)$	$(k+l)/(k+l+m+n)$
B	$m/(k+m)$	$n/(l+n)$	$(m+n)/(k+l+m+n)$
A+B	$k+m = 100\%$	$l+n = 100\%$	$k+l+m+n = 100\%$

Tabel 5.4
Format Tabel Perhitungan Persentase secara Diagonal Laki-laki dan Perempuan antar Kategori dan antar Jenis Kelamin

KATEGORI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
A	$k/(k+l+m+n)$	$l/(k+l+m+n)$	$(k+l)/(k+l+m+n)$
B	$m/(k+l+m+n)$	$n/(k+l+m+n)$	$(m+n)/(k+l+m+n)$
A+B	$(k+m)/(k+l+m+n)$	$(l+n)/(k+l+m+n)$	$(k+l+m+n) = 100\%$

5.2 Penyajian Gambar

Penyajian data dalam bentuk gambar membantu pembaca untuk menerima pesan yang digambarkan data mengenai fakta di lapangan dengan cepat. Pembaca lebih mudah mengerti dan memanfaatkan gambar dengan warna yang menarik untuk mengambil kesimpulan dibandingkan membaca data dalam bentuk angka.

Penyajian data dengan gambar dapat berupa diagram, grafik maupun peta tematik. Beberapa jenis gambar yang biasa disajikan adalah diagram batang, poligon dan diagram lingkaran. Selain itu, tabel dengan informasi gender yang penting perlu untuk disajikan gambarnya.

5.3 Penyajian Narasi

Data terpilah menurut jenis kelamin diharapkan dapat memberikan potret kondisi data pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu penyajian narasi diperlukan untuk memberikan penjelasan dari tabel serta gambar dimaksud.

Penyajian narasi dimulai dari menunjukkan informasi gender yang signifikan satu per satu dari data dalam tabel. Informasi gender yang signifikan terutama bila menyangkut perbedaan nilai komposisi untuk laki-laki dan perempuan akan membuka wawasan pembaca.

Untuk tabel data terpilah yang bersifat time-series, penyajian narasi memberikan gambaran tentang kecenderungan data berdasarkan periode waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan data.

5.4 Contoh Perhitungan dan Penyajian Data Terpilah dalam bentuk Tabel, Gambar, dan Narasi

Berikut ini adalah contoh untuk penyajian tabel, gambar, dan narasi data terpilah, terkait Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PU menurut Status Kepegawaian (struktural/fungsional/ staf) dan Jenis Kelamin, Tahun 2011 (Tabel A1). Selanjutnya contoh tabel C1 dan C2 untuk kegiatan ke-Cipta Karya-an.

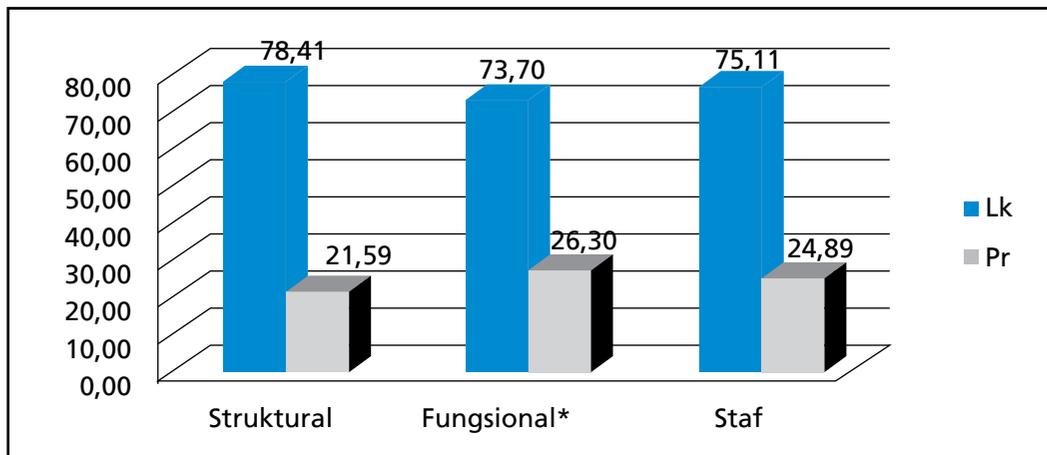
Contoh penyajian data terpilah kelompok Tabel A.1 – A.12, serta contoh kelompok Tabel B.1 – B.9 terdapat pada Buku II.

Tabel 5.5
Contoh Tabel A.1 Jumlah dan Persentase SDM Kementerian PU menurut Status
Kepegawaian (Struktural/Fungsional/staf) dan Jenis Kelamin, Tahun 2011

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai (%)		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Struktural	1.064	293	1.357	78,41	21,59	100,00
2.	Fungsional*	597	213	810	73,70	26,30	100,00
3.	Staf	14.900	4.938	19.838	75,11	24,89	100,00
	Jumlah **	16.535	5.439	21.974	75,25	24,75	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian Kementerian PU, 2011

Gambar 5.1 Contoh Penyajian Gambar untuk Contoh Tabel A.1



Gambar 5.2 Contoh Penyajian Narasi untuk Contoh Tabel A.1

- Komposisi Pegawai PU Menurut Jenis Kelamin didominasi oleh Laki-Laki sebesar 16535 pegawai = 75% sedangkan Perempuan sebesar 5439 pegawai=25%
- Adapun Komposisi Pegawai PU berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin adalah sbb : Struktural sebesar 1357 pegawai dengan perbandingan L=78% dan P=22%, Fungsional sebesar 810 pegawai dengan perbandingan L=74% dan P=26%, dan yang terbesar adalah Staf 19838 pegawai dengan perbandingan L=75% dan P=25%.

Tabel 5.6
Contoh Pertama Tabel C.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan Tahun 2008 – 2010

Satminkal : Ditjen Cipta Karya
 Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
 Komponen : Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

Sub Komponen	Pembangunan/Pelaksanaan		Pembangunan/Pelaksanaan	
	RIS - 2009		RIS - 2010	
	L	P	L	P
Sub Komponen/Sub Kegiatan: Persiapan, Sosialisasi dan Pelatihan RIS 2009				
1. Rembug Warga Persiapan				
Jumlah			57.055	39.649
Prosentase			59,00	41,00
2. Sosialisasi Desa				
Jumlah			58.128	34.296
Prosentase			62,89	37,11
3. Musyawarah Desa 1				
Jumlah	47.907	32.481	60.500	36.665
Prosentase	59,59	40,41	62,27	37,73
4. Anggota OMS				
Jumlah			5.739	3.227
Prosentase			64,01	35,99
5. Musyawarah Desa 2				
Jumlah	52.158	32.160	57.328	33.451
Prosentase	61,86	38,14	63,15	36,85
6. Musyawarah Desa 3				
Jumlah	52.765	32.237	54.314	30.204
Prosentase	62,08	37,92	64,26	35,74
7. Anggota KPP				
Jumlah			3.762	1.436
Prosentase			72,37	27,63

Tabel 5.7

Contoh Pertama Tabel C.2 Data Terpilah Kuantitatif Penerima Manfaat Tahun 2010

Satminkal : Ditjen Cipta Karya
Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Komponen : Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

Sub-Komponen 1:

Data Kuantitatif :

RIS PNPM dilakukan di 4 propinsi yaitu di propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau.

Penjelasan:

1. Sosialisasi : adalah upaya memperkenalkan Program RIS-PNPM Mandiri kepada masyarakat sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan di tingkat desa, serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung Program. Indikator tingkat kehadiran adalah 40% perempuan
2. Musyawarah Desa 1 : masih bagian dari sosialisasi program dan merupakan forum untuk membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kader Desa (KD). Indikator tingkat kehadiran adalah 40% perempuan
3. Musyawarah Desa 2 : merupakan diskusi untuk perumusan prioritas masalah, perumusan rencana PJM Pronangkis dan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) serta pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Indikator tingkat kehadiran adalah 40% perempuan
4. Musyawarah Desa 3 : bertujuan menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP). Indikator tingkat kehadiran adalah 40% perempuan

Data Kualitatif

Penjelasan :

1. Rembug Warga Persiapan : dilakukan melalui beberapa pertemuan di masyarakat dengan melibatkan perempuan dan masyarakat miskin
2. Anggota OMS : bertindak sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa
3. Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan : terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota dalam KPP (sehingga jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam Musyawarah Desa).

Tabel 5.8
Contoh Kedua Tabel C.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan Tahun 2008 - 2010

Satminkal : Ditjen Cipta Karya
 Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum
 Komponen : Pembangunan

Pembinaan/Pemberdayaan (SDM)							
No.	Sub Komponen	2008 (%)		2009 (%)		2010 (%)	
		L	P	L	P	L	P
1	Sosialisasi Program	65,37	34,63	52,17	47,83	56,71	43,29
2	Pelaksanaan Imas [Identifikasi Masalah dan analisis Sesuatu]	36,35	63,65	34,43	65,57	30,95	69,05
3	Pelaksanaan pemicuan CLTS	25,92	74,08	25,73	74,27	27,05	72,95
4	Partisipasi dalam pemilihan LKM [Lembaga Keswadayaan Masyarakat]	62,43	37,57	64,17	35,8	63,92	37,08
5	Pengurus LKM	64,77	35,23	62,58	37,42	62,22	37,78
6	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air minum	70,3	29,7	68,7	34,3	65,7	34,3
	Penerima Manfaat						
7.	a. Penerima Manfaat	50	50	50	50	50	50
	b. Peningkatan layanan akses air minum	30	70	23,1	76,9	22,7	77,3
	c. Penerima Manfaat - Sarana Sanitasi	50	50	50	50	50	50
	d. Peningkatan akses Sanitasi	50	50	50	50	50	50
8.	Pengurus BP-SPAMS	74,73	25,27	63,38	36,62	60,43	39,57

Tabel 5.9
Contoh Kedua Tabel C.2 Data Terpilah Penerima Manfaat Hasil Pembangunan

Satminkal : Ditjen Cipta Karya
Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,
 dan Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum
Komponen : Pembangunan

Komponen 1 : Pembangunan

Data Kuantitatif

Penjelasan :

Penerima manfaat ini adalah seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan pada 15 propinsi, 110 kabupaten/kota, 3960 kelurahan/desa.

Data Kualitatif:

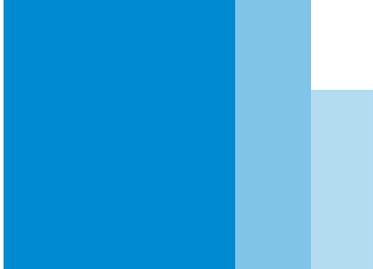
Penerima manfaat ini adalah seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan pada 15 propinsi, 110 kabupaten/kota, 3960 kelurahan/desa.

Penerima manfaat dalam akses air minum lebih cenderung lebih tinggi perempuan, hal ini sesuai dengan faktor kebiasaan masyarakat dimana kegiatan rumah tangga yang banyak berhubungan dengan air minum adalah perempuan

Penyediaan data terpilah diberbagai sektor sudah merupakan keharusan, sesuai dengan kesepakatan global agar pemerintah dapat melaporkan keberhasilannya dalam upaya memenuhi komitmen global, untuk mengurangi atau meniadakan kesenjangan gender dan meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk menyusun analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, maupun untuk mereformulasikan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Buku Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU yang responsif gender.

Sebagai salah satu buku tata cara yang merupakan pionir, buku ini masih perlu penyempurnaan, antara lain menambahkan data terpilah SDM Kementerian PU menurut kelompok usia dan data terpilah spesifik bidang PU yang mungkin sulit untuk diperoleh, mengingat sasaran pembangunannya tidak selalu terkait dengan individu laki-laki maupun perempuan.

Walaupun buku ini ditujukan untuk penyusunan data terpilah di lingkungan Kementerian PU, diharapkan buku ini dapat juga digunakan Dinas ke-PU-an di daerah dan instansi-instansi lain yang terkait, untuk menyusun perencanaan dan penganggaran serta penyusunan kebijakan yang responsif gender.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I
PENYELENGGARAAN STUDI KUALITATIF

Lampiran II
TABEL DUMMY KONDISI SDM KEMENTERIAN PU
SECARA UMUM MENURUT JENIS KELAMIN

Lampiran III
TABEL DUMMY KONDISI KETENAGAKERJAAN
NASIONAL MENURUT JENIS KELAMIN

PENYELENGGARAAN STUDI KUALITATIF

1. *Rapid Assessment*

Isu gender pada suatu bidang kehidupan dapat ditemukenali dari data kuantitatif yang terpilah menurut jenis kelamin. Data yang menunjukkan ciri atau karakteristik bidang kehidupan dari kelompok laki-laki secara relatif dibandingkan dengan kelompok perempuan. Caranya dengan menghitung dulu statistik atau indikator untuk masing-masing kelompok dan kemudian membandingkannya. Bila ada perbedaan nilai statistik atau indikator yang signifikan, maka ini menunjukkan adanya isu gender. Persoalan yang sering terjadi saat ini adalah tidak tersedianya data kuantitatif yang memadai tentang berbagai hal yang menyangkut kondisi, peran dan status laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ini terjadi karena data yang dikumpulkan tidak pernah dipilah menurut jenis kelamin atau bahkan tidak pernah dikumpulkan sama sekali. Untuk mengatasi persoalan ini suatu alternatif metode dapat dipilih.

Rapid Assesment Procedures (RAP) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang permasalahan yang ada di kalangan masyarakat, termasuk isu gender, secara cepat. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, mulai dari yang sederhana yaitu atribut, kemudian narasi, sampai yang paling lengkap yaitu cerita tentang sebab/akibat terjadi isu gender. Karena sifatnya yang harus cepat dan efisien maka RAP tentu tidak dapat meliputi responden atau informan yang banyak dan seperti umumnya studi kuantitatif. Faktor *representativeness* untuk masyarakat luas, sementara ini, tidak menjadi hal yang penting. Oleh karena itu hasil RAP hanya menunjukkan kecenderungan dan tidak dapat digeneralisasi pada populasi yang besar.

Selain sebagai alternatif pilihan untuk mengisi kekosongan data kuantitatif, RAP sebagai suatu metode banyak dimanfaatkan untuk berbagai hal antara lain untuk:

- a. Menjaring pendapat tentang sesuatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat,
- b. Menjadi embrio penelitian mendalam yang berskala lebih besar,
- c. Melengkapi hasil pengumpulan data kuantitatif tentang sebab-sebab dan bagaimana suatu fenomena yang ditunjukkan hasil studi kuantitatif dapat terjadi,

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada RAP adalah antara lain wawancara pada sekelompok orang secara mendalam (*Indepth Interview, IDI*) satu per satu atau perorangan dan *Focus Group Discussion (FGD)* secara berkelompok. Selain dana, waktu yang tersedia untuk melakukan penilaian juga menjadi faktor utama untuk menentukan besarnya sampel yang dipilih. Pemilihan responden atau informan tidak dilakukan secara random melainkan secara purposif sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam menemukannya isu gender yang terdapat dalam masyarakat secara cepat, bila tidak mempunyai data kuantitatif yang handal, lebih dianjurkan untuk menggunakan FGD dari pada IDI.

2. Focus Group Discussion

FGD adalah salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik, secara cepat, melalui diskusi kelompok. Menurut banyak peneliti menegaskan bahwa FGD bukan merupakan suatu deretan wawancara/tanya jawab terhadap banyak orang secara individu maupun suatu jenis rapat yang menjurus pada kesepakatan, tetapi suatu diskusi yang terfokus pada isu atau permasalahan tertentu saja.

FGD dipimpin oleh seorang moderator yang mengemukakan adanya isu gender di suatu bidang yang kemudian meminta kepada semua peserta secara bergantian merespon. Untuk melaksanakan tugasnya, moderator dibantu oleh seorang sekretaris yang tugasnya berkaitan dengan kegiatan mencatat dan merekam diskusi, mengingatkan moderator tentang butir diskusi yang perlu diangkat, waktu diskusi baik yang menyangkut penggunaan waktu oleh masing-masing responden maupun diskusi secara keseluruhan, serta melengkapi proses pelaksanaan FGD sebelum dianalisis oleh tim.

Peserta FGD tidak harus homogen tetapi hindarkan kemungkinan adanya peserta yang mendominasi diskusi. Dalam banyak hal dominasi ini disebabkan karena hadirnya satu atau dua orang yang merasa statusnya lebih tinggi. Oleh karena perlu diupayakan agar semua peserta dapat memberikan respons

dalam diskusi secara bebas tanpa perasaan tertekan. Respons yang diberikan oleh informan tidak boleh menyimpang dari isu gender walaupun demikian informan boleh mengemukakan pendapatnya tentang respons yang diberikan oleh informan yang sebelumnya berbicara. Perlu ditambahkan di sini bahwa undangan kepada laki-laki dan perempuan sebagai peserta dibutuhkan agar diskusi tidak bias gender.

Beberapa butir persiapan dan pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian diusulkan peneliti. Diantara butir-butir sebagai berikut sangat ditekankan perlunya oleh Irwanto (1998):

a. Persiapan FGD

i. Daftar peserta

Daftar ini sangat bermanfaat terutama untuk menyusun analisis. Para peserta dapat mengisi sendiri daftar ini atau dengan pertolongan tim penyelenggara. Keterangan yang perlu ditanyakan dalam daftar tersebut adalah terutama latar belakang peserta FGD yang kira-kira dapat dikaitkan dengan respons mereka.

ii. Alat tulis dan alat perekam

Alat tulis tidak saja dibutuhkan oleh pembantu moderator tetapi juga dibutuhkan oleh peserta untuk mencatat hal-hal dianggap penting dan untuk melengkapi respons peserta FGD bila waktu yang dibutuhkan tidak mencukupi. Sementara itu alat perekam hanya disediakan untuk moderator agar analisis tidak menyisakan input peserta sebagai bahan analisis.

iii. Penataan ruang (diskusi dan blocker)

Ruang diskusi disarankan yang nyaman dengan tempat duduk yang diatur setengah melingkar atau berbentuk huruf U. Tempat duduk peserta diskusi perlu diatur sedemikian rupa sehingga gangguan dari luar sekecil mungkin. Di samping ruang diskusi diusulkan ada ruang *blocker* yang digunakan sebagai cadangan ruangan kalau ada pejabat atau orang yang berpengaruh datang hanya untuk urusan formalitas dan *ceremonial*, karena kehadirannya dalam diskusi dapat mempengaruhi kebebasan peserta untuk berbicara bebas. Pelaksanaan FGD akan berdampak lebih baik bila proses diskusi tidak terganggu dengan adanya orang selain peserta yang hadir dalam ruangan.

iv. Pengeras suara

Sarana ini penting bagi kelancaran FGD karena semua hadirin dapat mendengar dengan jelas hal-hal yang didiskusikan.

v. Makanan kecil

Disarankan makanan kecil disiapkan dan dihidangkan setelah atau sebelum diskusi, agar perhatian peserta tidak tertuju pada hal lain kecuali permasalahan yang didiskusikan.

b. Pelaksanaan

i. Jumlah peserta

Berdasarkan pengalaman jumlah peserta dalam FGD sebesar 7-11 orang akan menghasilkan jawaban dengan variasi yang tinggi bila peserta yang diundang cukup bervariasi..

ii. Ciri-ciri peserta

Peserta dipilih dari kelompok yang relevan dengan permasalahan yang akan didiskusikan. Variasi latar belakang peserta perlu dijaga agar tidak menimbulkan dominasi pada waktu diskusi.

iii. Peranan jeda

Waktu istirahat diperlukan bagi para peserta diskusi untuk merenungkan kembali permasalahan yang dilemparkan moderator serta respon apa yang telah diberikan oleh para peserta FGD dan dirinya sendiri. Bagi moderator dan pembantunya, waktu istirahat ini dapat memberikan peluang bagi mereka untuk menyempurnakan catatan dan menambahkan informasi yang secara non-verbal ditunjukkan.

iv. Komunikasi moderator-pencatat proses.

Pembagian tugas antara moderator dan pembantunya sudah cukup jelas, moderator memimpin diskusi dan pembantu moderator mencatat diskusi dan mengingatkan moderator. Walaupun demikian pencatat dapat minta klarifikasi tentang isi diskusi

c. Analisis

Cara menganalisis hasil FGD tidak jauh berbeda dengan cara yang biasa ditempuh dalam penelitian kualitatif lainnya. Peneliti yang biasanya bertindak sebagai moderator perlu memeriksa semua respons yang dikemukakan oleh peserta diskusi. Kemudian pilah respons tersebut menurut latar belakang responden seperti jenis kelamin, pendidikan, karakteristik lingkungan tempat dibesarkan dan etnis. Laporkan variasi peserta, sikap peserta, variasi respons menurut berbagai karakteristik peserta, dan masalah lain yang timbul pada waktu diskusi yang tidak dapat dipisahkan dari fokus diskusi.

d. Pemanfaatan FGD

FGD dapat digunakan untuk menjangkau adanya isu gender di bidang ke-PU-an. Agar adanya isu ini terdeteksi dengan baik peserta FGD perlu diadakan lebih dari sekali, sebaiknya satu kelompok untuk beberapa Unit Kerja setingkat Direktorat untuk masing-masing Satminkal yang mempunyai output kegiatan yang mirip. Peserta yang diundang sebaiknya laki-laki dan perempuan dari golongan kepangkatan yang sama. Dalam menyusun *Gender Budget Statement (GBS)* diskusi tentang kegiatan Kementerian PU yang responsif gender, telah dilakukan (KempU dan KPPPA, 2009).

3. Content Analysis

Content analysis (CA) atau analisis isi adalah suatu studi kuantitatif yang banyak dimanfaatkan di bidang komunikasi untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan pemberitaan. Dengan menghitung jumlah kata, pernyataan dan isi yang menunjukkan fokus pemberitaan dalam koran, majalah, atau buletin upaya pemberitaan dapat dinilai efektifitas dan keberhasilannya. Dalam perkembangannya CA telah banyak pula digunakan untuk menganalisis laporan, aturan-aturan dan jenis dokumen lainnya. Oleh Saparinah Sadli dkk. (1985) dan Surbakti (2008), CA telah dikembangkan juga sebagai alat studi kualitatif.

Dalam rangka menyusun indikator untuk membandingkan kondisi, peran dan status perempuan dalam masyarakat, dengan dukungan dari Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, KOWANI, dan Unicef, Saparinah Sadli dkk. telah melakukan analisis isi dari berbagai dokumen penting negara seperti Undang-Undang Dasar, Garis Besar Haluan Negara (GBHN), rencana pembangunan lima tahun (Repelita I - Repelita III) dan peraturan pemerintah. Telah dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan dalam dokumen negara tersebut tentang kondisi, peran dan status yang diinginkan negara terhadap perempuan di Indonesia. Setelah pernyataan-pertanyaan tersebut dipilih lalu diterjemahkan dalam bentuk berbagai indikator sosial. Hasil kerja mereka kemudian diserahkan kepada BPS yang kemudian mengisi nilai data dan indikatornya yang terpilah menurut laki-laki dan perempuan dan diterbitkan dengan judul Indikator Sosial Wanita Indonesia (BPS, 1986).

Kesempatan Surbakti (2008) menggunakan analisis isi ketika hendak menyusun indikator kinerja untuk menilai keberhasilan Pemda Papua. Cara menyusun analisis ini diajarkan dalam pelatihan tentang pemanfaatan statistik dalam proses pemerintahan di Privinsi Papua. Berbagai dokumen mengenai visi, misi, kebijakan, program dan rencana kerja pemerintah Papua ditelaah oleh para peserta pelatihan dan menghasilkan daftar indikator kinerja Pemda Papua.

Analisis isi dapat digunakan untuk menilai sensitivitas gender dari berbagai output Kementerian PU yang berupa dokumen seperti kebijakan, aturan, NSPK dan program serta kegiatan. Caranya dengan melakukan identifikasi pernyataan-pernyataan dalam dokumen yang kemungkinan mengandung adanya perbedaan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang dapat dipetik oleh laki-laki dan perempuan.

Khususnya dalam kaitannya dengan buku pedoman penyusunan data terpilah, analisis isi dianjurkan untuk digunakan dalam menelaah isi kegiatan setara sub-komponen guna memperoleh informasi terutama tentang apa rincian kegiatan yang dilakukan, siapa pelaku kegiatannya, apa indikator keberhasilannya, siapa yang menikmati keberhasilan itu dan tentu saja di mana dan kapan. Pernyataan yang dianalisis tidak terbatas pada nama kegiatannya saja, tetapi juga latar belakang kegiatan dan tujuan diusulkannya kegiatan serta visi dan misi Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan itu.

TABEL *DUMMY* KONDISI SDM KEMENTERIAN PU SECARA UMUM MENURUT JENIS KELAMIN

Tabel-tabel berikut dibuat untuk 8 Satminkal (Setjen, Itjen, Bapekon, Balitbang, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta karya, Ditjen Penataan Ruang). Kondisi umum yang dipetakan adalah kondisi tahun terakhir.

Tabel A.1. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Status Kepegawaian (struktural/fungsional/staf) dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Struktural						
2.	Fungsional						
3.	Staf						
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.2. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Eselon I						
2.	Eselon II						
3.	Eselon III						
4.	Eselon IV						
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.3. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Golongan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Golongan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Golongan IV						
2.	Golongan III						
3.	Golongan II atau kurang						
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.4. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	S3						
2.	S2						
3.	D4/S1						
4.	D1-D3						
5.	SLTA atau kurang						
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.6. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) Perekrutan Tiga Tahun Terakhir menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun ,,,....

No.	Tahun Perekrutan/ Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pegawai Baru			Persentase Pegawai Baru		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Tahun 2010						
	S3						
	S2						
	D4/S1						
	D1-D3						
	SLTA atau kurang						
	Sub Jumlah						100%
2.	Tahun 2009						
	S3						
	S2						
	D4/S1						
	D1-D3						
	SLTA atau kurang						
	Sub Jumlah						100%
3.	Tahun 2008						
	S3						
	S2						
	D4/S1						
	D1-D3						
	SLTA atau kurang						
	Sub Jumlah						100%
dst							
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.7. Jumlah SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Keikutsertaan dalam Program Tugas Belajar S2/S3 Di Luar/Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pendidikan Luar/ Dalam Negeri	Jumlah Pegawai Peserta Program			Persentase		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pendidikan Luar Negeri						
	S3						
	S 2						
	Sub Jumlah			100%			
2.	Pendidikan Dalam Negeri						
	S3						
	S2						
	Sub Jumlah			100%			
	Jumlah Peserta seluruhnya			100%			

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.8. Jumlah SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Keikutsertaan dalam Diklat Teknis/ Administrasi/Penjenjangan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Jenis Pendidikan Pelatihan	Jumlah Pegawai Peserta Program			Persentase		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pendidikan/Pelatihan Teknis						
	Diklat Teknis A						
	Diklat Teknis B						
	Diklat Teknis C, dst						
	Sub Jumlah			100%			
2.	Pendidikan/Pelatihan Admin						
	Diklat Administrasi K						
	Diklat Administrasi L						
	Diklat Administrasi M, dst						
	Sub Jumlah			100%			
3.	Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan						
	Diklat Penjenjangan P						
	Diklat Penjenjangan Q						
	Diklat Penjenjangan R, dst						
	Sub Jumlah			100%			
	Jumlah			100%			

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.9. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Satminkal/Balai/Unit dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pusat/Biro/Direktorat	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Direktorat A						
2.	B						
3.	C						
dst							
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.10. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pusat/Biro/Direktorat (Eselon)	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Eselon II						
	Eselon III						
	Eselon IV						
	Sub Jumlah						100%
2.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Eselon II						
	Eselon III						
	Eselon IV						
	Sub Jumlah						100%
3.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Eselon II						
	Eselon III						
	Eselon IV						
	Sub Jumlah						100%
dst							
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.11. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pusat/Biro/Direktorat (Golongan)	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Golongan IV						
	Golongan III						
	Golongan II atau kurang						
	Sub Jumlah						100%
2.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Golongan IV						
	Golongan III						
	Golongan II atau kurang						
	Sub Jumlah						100%
3.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Golongan IV						
	Golongan III						
	Golongan II atau kurang						
	Sub Jumlah						100%
dst							
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

Tabel A.12. Jumlah dan Persentase SDM (Satminkal/Balai/Unit) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jenis Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pusat/Biro/Direktorat (Fungsional)	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Peneliti						
	Perencana						
	Dosen/Widyaiswara						
	dst....						
	Sub Jumlah						100%
2.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Peneliti						
	Perencana						
	Dosen						
	dst....						
	Sub Jumlah						100%
3.	Pusat/Biro/Direktorat						
	Peneliti						
	Perencana						
	Dosen/ Widyaiswara						
	dst....						
	Sub Jumlah						100%
dst							
	Jumlah						100%

Sumber: Kementerian PU

TABEL DUMMY KONDISI KETENAGAKERJAAN NASIONAL MENURUT JENIS KELAMIN

Tabel-tabel berikut menyajikan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan khususnya yang terserap di sektor bangunan/konstruksi. Data dapat diperoleh dari BPS yang merupakan hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan antara lain hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Perusahaan Konstruksi Besar/Sedang, dan Survei Usaha Kecil dan Rumah Tangga di sektor konstruksi yang merupakan bagian dari Sensus Ekonomi. Pengelompokan data dapat mengikuti publikasi tahun terakhir yang ada.

Tabel B.1. Jumlah dan Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan						
2.	Pertambangan dan penggalian						
3.	Industri pengolahan						
4.	Listrik, gas dan air						
5..	Bangunan/konstruksi						
6.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel						
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi						
8.	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan						
9.	Jasa kemasyarakatan termasuk pegawai negeri di Kementerian PU						
10.	Lainnya						
	Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel B.2. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	15-19						
2.	20-24						
3.	25-29						
4.	30-34						
5..	35-39						
6.	40-44						
7.	45-50						
8.	54-59						
9.	60 ke atas						
	Jumlah				100%	100%	100%

Catatan: Pengelompokan data dapat mengikuti publikasi yang ada

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel B.3. Jumlah dan Persentase Pekerja Konstruksi menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Status Pekerjaan	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Berusaha sendiri						
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar						
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar						
4.	Buruh/karyawan/pegawai						
5.	Pekerja bebas						
6.	Pekerja keluarga/tak dibayar						
	Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel B.4. Jumlah dan Persentase Pekerja Konstruksi menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Manager						
2.	Teknisi						
3.	Tenaga profesional						
4.	Tenaga administrasi						
5..	Tenaga kasar						
dst							
	Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel B.5. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD						
2.	SD atau sederajat						
3.	SMP atau sederajat						
4.	SMU atau sederajat						
5.	D1-D3						
6.	D4/S1						
7.	S2						
8.	S3						
	Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel B.6. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Rata-rata Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Rata-rata Jam Kerja Seminggu	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Kurang dari 5 jam						
2.	5-9 jam						
3.	10-14 jam						
4.	15-19 jam						
5..	20-24 jam						
6.	25-29 jam						
7.	30-34 jam						
8.	35-39 jam						
9.	40-44 jam						
10.	45-49 jam						
11.	50 jam lebih						
	Jumlah				100%	100%	100%

Catatan: Pengelompokan data dapat mengikuti publikasi yang ada

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel B.7. Jumlah dan Persentase Pekerja Sektor Konstruksi menurut Skala Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Status	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Besar						
2.	Sedang						
3.	Kecil/rumah tangga*						
	Jumlah				100%	100%	100%

*Estimasi secara sampel

Sumber: BPS, Survei Tahunan/Sensus Ekonomi

Tabel B.8. Jumlah dan Persentase Pekerja Perusahaan Konstruksi Besar/Sedang menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	SD atau sederajat						
2.	SMP atau sederajat						
3.	SMU atau sederajat						
4.	D1-D3						
5.	D4/S1						
6.	S2/S3						
	Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: BPS, Survei Perusahaan Konstruksi

Tabel B.9. Jumlah dan Persentase Pekerja Usaha Konstruksi Skala Kecil/Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin, Tahun

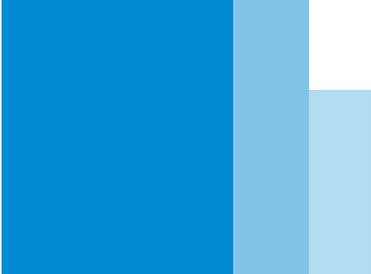
No.	Skala Usaha	Jumlah Pekerja			Persentase Pekerja		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1.	Pengusaha						
2.	Pekerja						
	Jumlah				100%	100%	100%

Sumber: BPS, Sensus Ekonomi

DAFTAR SINGKATAN

AKI	Asosiasi Konstruksi Indonesia
AKPM	Akses, kontrol, partisipasi dan manfaat
Balita,	Bayi di bawah lima tahun
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
Bapekon	Badan Pembina Konstruksi
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BPS	Badan Pusat Statistik
<i>CEDAW</i>	<i>Convention on the Elimination of Decrimination against Women</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
<i>FGD</i>	<i>Focus group discussion</i>
<i>GAP</i>	<i>Gender Analysis Pathway</i>
<i>GBS</i>	<i>Gender Budget Statement</i>
Itjen	Inspektorat Jenderal
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender
K/L	Kementerian dan Lembaga
KPP	Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Lansia	Lanjut Usia

<i>MIS</i>	<i>Management Information System</i>
<i>MDGs</i>	<i>Millenium Development Goals</i>
PP dan PA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
PU	Pekerjaan umum
PUG	Pengarusutamaan Gender
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDA	Sumber Daya Air
SDM	Sumber Daya Manusia
Setjen	Sekretariat Jenderal
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Turbinbangwas	Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas): *Pedoman Pencacah*. Jakarta, BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik. Jakarta, BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas): *Pedoman Pencacah*. Jakarta, BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Jakarta, BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia. Jakarta, BPS.

BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2003. Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender: Peta dan Disparitas Pencapaian Antar Wilayah. Jakarta, Badan Pusat Statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2007, *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*. Jakarta, Bappenas dan UNDP

Irwanto, Ph.D. 1998. *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta, UNIKA Atmajaya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2009. Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan Program Dan Penganggaran. Jakarta, KemPU.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2009. Pedoman Penyusunan Data Tepilah. Jakarta, KPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 2010. Pedoman Penyusunan Data tepilah Dan Statistik Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Jakarta, KPPPA.

Kemenerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. 2008. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan. Jakarta, Kemenakertrans.

Otong Suhyanto Msi. 2011. Penyajian Data dalam Bentuk Grafik, Diagram atau Gambar. Internet.

Saparinah Sadli, Mayling Oey Gardiner, Riga Adwoso dan Soedarti Surbakti. 1985. *Identifikasi Indikator Sosial Wanita Indonesia*. Jakarta, KOWANI, Meneg PP dan Unicef.

Surbakti, Soedarti, 2009, Penyusunan Indikator Kinerja Provinsi Papua Berbasis RPJMD, Bahan TOT dalam Pelatihan tentang Manfaat Statistik dalam Proses Pemerintahan. Jayapura, *The World Bank*, 2009.

UNDP, 2006, *Human Development Report 2006, Beyond Scarcity: Power, Poverty dan the Global Water Crisis*. New York , UNDP

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7211129, Fax. : (021) 7211129

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
Telp. (021) 3842638, 3805563, Fax. (021) 3805562, 3805559
Website : www.menegpp.go.id